

PERAN STAKEHOLDER DALAM PEMBERDAYAAN PETANI TEBU DI KABUPATEN DOMPU PROVINSI NTB

I Putu Cakra Putra Adnyana dan Muhammad Saleh Mohktar
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) NTB
Jl. Raya Peninjauan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB, 83371
Email: putucakra@yahoo.co.id, salehmokhtar.ntb@gmail.com
HP: 081915881663 dan 087765885723

ABSTRAK

PT SMS, pemerintah pusat berkerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Dompus pada tahun 2014 telah mengembangkan usahatani tebu khususnya pada lahan kering/tegalan disertai pembangunan pabrik gula. Terjadinya pergeseran fungsi lahan pengembangan tebu tersebut dikarenakan adanya alih fungsi lahan sawah irigasi teknis menjadi bangunan industri dan infrastruktur lainnya. Dengan adanya pergeseran budidaya tebu pada lahan kering/tegalan diharapkan tercapainya sasaran swasembada gula nasional. Implementasi intensifikasi dan ekstensifikasi usahatani tebu di lahan tegalan dapat dilakukan dengan cara pendampingan dan pengawalan teknologi melalui penyediaan teknologi yang sesuai (P3GI, 2008). Tujuan kajian ini adalah 1). untuk mengetahui Peran *stakeholder* dalam kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat di pabrik Gula (PG) pekat PT SMS Kabupaten Dompus, 2). untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholder* dalam kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat di PT SMS Kabupaten Dompus. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* terkait dalam Pengembangan Tebu Rakyat pada wilayah kerja PT SMS telah menjalankan peran dengan baik. Hanya saja penyuluh dibidang perkebunan perlu ditingkatkan kinerjanya dengan melakukan pendampingan ke petani tebu secara intensif.

Kata kunci: Stakeholder, Petani, Tebu, dompu, NTB

STAKEHOLDER ROLE IN EMPOWERING SUGAR CANE FARMERS IN DOMPU DISTRICT NTB PROVINCE

ABSTRACT

PT SMS, the central government in collaboration with the regional government of Dompus district in 2014 has developed sugarcane farming especially on dry land / moor accompanied by the construction of a sugar factory. The shift in the function of sugar cane development land is due to the conversion of technical irrigated rice fields into industrial buildings and other infrastructure. With the shift in sugarcane

cultivation on dry land / moor it is expected to achieve national sugar self-sufficiency targets. The implementation of intensification and extensification of sugarcane farming on dry land can be done by assisting and escorting technology through the provision of appropriate technology (P3GI, 2008). The purpose of this study is 1). to find out the role of stakeholders in the activities of the Development of People's Sugar Cane in the concentrated sugar factory (PG) of PT SMS in Dompus Regency, 2). to find out the supporting and inhibiting factors of the role of stakeholders in the activities of the Development of People's Sugar Cane in PT SMS Dompus Regency. Based on the studies that have been conducted, it can be concluded that the relevant stakeholders in the Development of People's Sugar Cane in the work area of PT SMS have performed their roles well. This can be seen from the role of stakeholders in activities (1) Providing capital credit to sugarcane farmers; (2) Extension activities; (3) Partnership Meeting Forum Activities; (4) Core garden activities; and (5) payment system. It's just that extension workers in the plantation sector need to be improved by providing assistance to sugarcane farmers intensively.

Keywords: Stakeholders, Farmers, Sugar Cane, Dompus, NTB

PENDAHULUAN

Sejak bergulirnya program Akselerasi Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tebu pada tahun 2002, perjalanan pergulaan nasional telah mencapai swasembada gula konsumsi satu tahun lebih cepat dari targetnya yaitu pada tahun 2008 dengan produksi 2.702 juta ton dan konsumsi 2.69 juta ton. Mulai tahun 2010 swasembada konsumsi ditingkatkan menjadi swasembada gula nasional selain untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga industri makanan, minuman dan farmasi melalui program swasembada gula nasional 2010-2014. Untuk memenuhi sasaran pencapaian swasembada gula nasional tersebut dilakukan upaya terpadu sektor on farm dan off farm (Puslitbangun 2014).

Provinsi Nusa Tenggara Barat dipercaya pemerintah pusat sebagai lokasi pengembangan tebu nasional untuk mendukung swasembada gula khususnya untuk pemenuhan kebutuhan gula nasional wilayah Timur sebesar \pm 750.000 ton per tahun. Melalui dukungan anggaran

APBN tahun 2014 dilakukan pengembangan tebu seluas 1.000 Ha, melibatkan petani plasma \pm 1.000 orang dan dukungan investasi swasta (PT. Sukses Mantap Sejahtera/SMS) sebesar 1,6 Triliun dengan luas areal HGU 5.700 Ha. Selanjutnya tahun 2015 pengembangan petani plasma atas dukungan APBN direncanakan 3.000 Ha sehingga jumlah pengembangan tebu untuk mendukung program swasembada gula nasional khususnya Indonesia Timur seluas 9.700 Ha, untuk memenuhi kapasitas pabrik gula 5.000 Ton per hari, dan mulai beroperasi September 2015, dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja sebanyak 12.000 orang.

PT SMS, pemerintah pusat berkerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Dompus pada tahun 2014 telah mengembangkan usahatani tebu khususnya pada lahan kering/tegalan disertai pembangunan pabrik gula. Terjadinya pergeseran fungsi lahan pengembangan tebu tersebut dikarenakan adanya alih fungsi lahan sawah irigasi teknis menjadi bangunan industri dan

infrastruktur lainnya. Dengan adanya pergeseran budidaya tebu pada lahan kering/tegalan diharapkan tercapainya sasaran swasembada gula nasional. Implementasi intensifikasi dan ekstensifikasi usahatani tebu di lahan tegalan dapat dilakukan dengan cara pendampingan dan pengawalan teknologi melalui penyediaan teknologi yang sesuai (P3GI, 2008).

Pendampingan dan pengawalan teknologi pada petani tebu masih kurang karena Kondisi produktivitas tebu di dompu umumnya masih rendah rata-rata 60,57 ton/ha jika dibandingkan dengan hasil kajian tebu oleh BPTP NTB di dompu tahun 2016 mencapai rata-rata 89,86 ton/ha (Putra, et al. 2017). Menurut Johnston dalam Basuno (2007) dan Sumodiningrat, (1999), kegagalan kegiatan pemberdayaan biasanya terjadi karena pelaksanaannya tidak didasarkan pada keperluan masyarakat. Pelaksanaan seperti ini juga dapat berpangkal pada ketidaktahuan masyarakat terhadap masalah yang mereka hadapi. Selain pendampingan teknologi juga diperlukan bantuan modal awal bagi petani tebu di kabupaten Dompu agar kegiatan usahatani tebu dapat berjalan dengan baik.

Pemberdayaan petani tebu didukung oleh beberapa kredit/modal yang dapat dimanfaatkan oleh petani tebu pada wilayah kerja PT SMS di dompu yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Dana dari APBN melalui dinas perkebunan provinsi yang diteruskan ke dinas perkebunan Kabupaten Dompu, kredit dari PT SMS. Masing-masing pengajuan kredit hingga proses pencairan kredit kepada petani melibatkan peran semua *stakeholder*. Hal ini memungkinkan adanya koordinasi dan pengawasan

sehingga memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing *stakeholder* terkait. Menurut Taschereau dan Campos dalam Thoha (2003, h.63) dan Hetifah (2003, h.3) *governance* merupakan suatu kondisi yang menjamin proses Kesetaraan, keseimbangan serta saling kontrol oleh tiga komponen utama yakni: pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan pengkajian peran *stakeholder* dalam pemberdayaan petani tebu dengan tujuan untuk mengetahui peran *stakeholder* dalam kegiatan pengembangan tebu rakyat di pabrik gula (PG) pekat PT SMS Kabupaten Dompu serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholder* dalam kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat di PT SMS Kabupaten Dompu.

METODOLOGI

Lokasi penelitian 4 koperasi petani tebu yaitu Koperasi Mitra Tambora, koperasi karya bersama, koperasi Tambora Abadi, koperasi Tambora sejahtera di Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen/arsip (Sugiyono, 2004). Penentuan responden dilakukan secara *Purposive Sampling* (pengambilan sampel secara sengaja), sehingga didapat responden 51 orang yang terdiri dari 36 orang pengurus dan anggota koperasi tebu, 10 orang penyuluh, 5 orang karyawan PT SMS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran *stakeholder* dalam Kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat

Robbins (2001, h.227) dan Hummels dalam Hadi (2011, h.103) mendefinisikan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit*”. Menurut Soekanto (1990) peran adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. *Stakeholder* memiliki peran masing-masing dalam kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat pada wilayah kerja PT SMS Kabupaten Dompu yang meliputi:

a. Kredit modal untuk petani tebu

Petani tebu mengajukan kredit modal dengan memenuhi kelengkapan persyaratan yaitu penyusunan Calon Petani Calon Lahan (CPCL), khusus untuk pengajuan KKP-E, petani harus menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), melakukan perjanjian giling tebu dengan pihak PT SMS, dan menyerahkan agungan/jaminan. Selanjutnya, pihak Tim Teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu dan PT SMS serta pihak koperasi yang mewadahi kelompok tanitebu rakyat melakukan *check* lahan untuk melakukan validasi kesesuaian data luas lahan di CPCL dan RDKK dengan luas lahan di lapangan. Peran *stakeholder* ini menimbulkan koordinasi dan pengawasan dari masing-masing pihak.

Penyaluran kredit modal kepada petani dilakukan oleh Koperasi tani karya bersama dan bank BRI melalui PT SMS untuk KKP-E. Penyaluran kredit ini dalam bentuk uang, khusus KKP-E penyaluran secara bertahap yaitu perbaikan jalan, biaya garap, bibit, dan pupuk. Pengembalian kredit dilakukan pada waktu giling tebu. Selanjutnya, pihak Koperasi Tani Karya bersama dan PT SMS akan mengembalikan pinjaman modal kepada pihak terkait yang sebelumnya telah dilakukan *Memorandum of Understanding* (MoU). Berdasarkan hal tersebut, pihak swasta yaitu Koperasi tani karya bersama dan pihak pemerintah dan PT SMS telah membantu petani dalam proses pengajuan hingga pengembalian kredit modal. Selain itu, pihak pemerintah kabupaten Dompu telah menyediakan fasilitas tenaga ahli yaitu pembentukan Tim Teknis untuk membantu petani tebu di lapangan.

b. Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan oleh Tim Teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu dan PT SMS, Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dari PT SMS, dan Pembantu Lapang Pendamping (PLP). Kegiatan penyuluhan terkait budidaya tebu meliputi:

1. Kunjungan lahan untuk verifikasi kesesuaian data luas lahan di CPCL dan RDKK dengan luas lahan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Teknis, TKP, dan PLP, maka muncul koordinasi dan pengawasan dari masing-masing pihak. Koordinasi bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap petani tebu agar kredit modal yang akan dicairkan kepada petani tepat

sasaran dan tidak terjadi manipulasi data.

2. Sosialisasi program-program pemerintah yang dilakukan pihak pemerintah maupun pihak swasta melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang diselenggarakan setiap tahun di Koperasi Tani Karya Bersama.
3. Selain itu, terdapat peran Pembina Tebu Rakyat (PTR) yang difasilitasi pihak PT SMS. Peran PTR ini lebih menonjol karena secara langsung mendampingi kelompok tani dalam budidaya tebu. Tugas PTR tersebut adalah (1) membantu pengajuan kredit modal oleh petani tebu, (2) melakukan pengukuran lahan dengan alat GPS, serta (3) membantu petani dalam pengurusan kelengkapan administrasi untuk pengajuan kredit.

c. Forum Temu Kemitraan (FTK)

Kegiatan FTK diselenggarakan beberapa kali selama musim tanam dan dihadiri oleh perwakilan pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu dan Provinsi NTB, perwakilan pihak PT SMS, perwakilan Koperasi tani Karya bersama, serta perwakilan dari petani tebu/kelompok tani. Kegiatan dalam FTK membahas permasalahan yang dihadapi petani tebu dan pabrik gula seperti: 1. Biaya tebang angkut sesuai jarak tempuh; 2. Teknik budidaya tebu 3. Sosialisasi program pemerintah.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sektor swasta (Pabrik Gula Pekat PT SMS) maupun masyarakat (petani tebu) diselesaikan dengan melibatkan pihak pemerintah daerah (Dishutbun Kabupaten Dompu) sebagai pembicara. Hal ini sesuai dengan pendapat Pratikno, (2004), Utomo (2006, h.8) dan Domai (2011, h.23) dalam konsep *government*,

negara merupakan institusi publik yang mempunyai kekuatan untuk merepresentasikan kepentingan publik dan memecahkan masalah-masalah publik yang menitikbertakan kepada "kompatibilitas" diantara para aktornya ialah: *State* (pemerintah); *Private* (sektor swasta); dan *Civil Society* (masyarakat madani).

d. Kegiatan Kebun Peraga

Kegiatan kebun peraga pada PT SMS disebut Kebun Inti. Tujuan dari Kebun Inti ini adalah pembibitan varietas tebu dalam jumlah banyak dengan lahan yang sempit. Bibit tebu melalui Kebun Inti akan diperbanyak di Kebun Bibit Iduk (KBI) selanjutnya di Kebun Bibit Desa (KBD) melalui pendanaan pemerintah kemudian didistribusikan kepada petani tebu rakyat.

Faktor pendukung dan faktor penghambat peran stakeholder dalam kegiatan Pengembangan Tebu Rakyat

a. Faktor Pendukung

1. Dominasi peran Pembina Tebu Rakyat (PTR) dalam kegiatan penyuluhan

Peran PTR ini terkait dalam pengukuran lahan di lapangan dengan alat GPS, membantu petani tebu dalam pelengkapan administrasi sebelum mengajukan KKP-E dan membantu petani dalam penyusunan CPCL dan RDKK. Setiap PTR membawahi ± 20 kelompok tani, hal ini akan mempermudah PTR dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan pendampingan kepada petani.

2. Kesiediaan Koperasi Tani Karya Bersama dan PT SMS untuk tetap menjadi pihak perantara

penyaluran kredit modal kepada petani tebu.

Selama ini Koperasi Tani Karya Bersama dan PT SMS menjadi pihak yang memfasilitasi kredit modal kepada petani tebu. Kredit modal yang berasal dari pemerintah dan swasta akan disalurkan kepada petani tebu melalui Koperasi Tani Karya Bersama dan PT SMS. Koperasi Tani Karya Bersama melakukan MoU dengan Dinas perkebunan Kabupaten Dompu. Peran PT SMS sebagai *avails*/penjamin juga membuat BRI terus memberikan kepercayaan kepada petani tebu untuk memperoleh kredit modal. Berdasarkan hal tersebut, Koperasi Tani Karya Bersama dan PT SMS memiliki komitmen untuk menjadi pihak perantara penyaluran kredit modal dari pemerintah dan swasta kepada petani tebu.

3. Kerjasama koordinasi antara Tim Teknis dari Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu dan PT SMS

Petugas penyuluh melakukan koordinasi dan pengawasan melalui verifikasi data luas lahan di CPCL dan RDKK dengan data luas lahan di lapangan. Petugas penyuluh melakukan kunjungan lahan ke areal sawah petani tebu. Perwakilan petugas penyuluh dari masing-masing komponen akan melakukan pengukuran lahan dengan GPS. Hasil pengukuran lahan dengan GPS akan disesuaikan dengan hasil luas lahan di CPCL dan RDKK.

b. Faktor penghambat

1. Koordinasi antara dinas pertanian dan dinas perkebunan kabupaten dompu

Data perluasan lahan tebu oleh dinas perkebunan dan data perluasan lahan padi oleh dinas pertanian

dompu bersama TNI (program UPSUS/Upaya khusus) saling tupang tindih sehingga terjadi perebutan wilayah binaan komoditas oleh masing-masing instansi/dinas yang berdampak pada keresahan dan ketidak pastian bagi petani tebu apakah tetap berusahatani tebu atau padi. Hal ini juga berpengaruh terhadap target produksi masing-masing komoditas baik itu tebu maupun padi. Setelah penggabungan kedua dinas menjadi dinas pertanian dan perkebunan tahun 2017 masalah ini mulai bisa diatasi.

2. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu tidak menyediakan tenaga penyuluh perkebunan yang mendamping secara intensif.

Peran petugas penyuluh hanya sebatas kunjungan lahan dan sosialisasi program pemerintah, sementara Pembina Tebu Rakyat (PTR) dari PT SMS yang lebih berperan dalam penyuluhan terhadap petani tebu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pihak pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten dompu kurang memperhatikan nasib kepentingan petani tebu yang membutuhkan bantuan informasi dan teknologi. Padahal, pemberdayaan petani merupakan instrument inti yang dapat digunakan untuk pengembangan masyarakat, tidak hanya terbatas pada aspek teknik produksi, tetapi juga peningkatan sumber daya manusia dan aspek bisnis, baik usaha tani maupun usaha di luar sektor pertanian sehingga mampu memandirikan masyarakat (Syafa'at *et al.* 2003; Suharto 2005; Payne 1997).

3. Sistem pembayaran tebu ke petani oleh Pihak PT SMS

PT SMS melakukan pembayaran tebu yang dibeli dari petani ternyata memerlukan waktu pembayaran 2 minggu-1 bulan bahkan mencapai 2 bulan karena tebu yang dibayar digunakan untuk bibit untuk lahan selanjutnya sehingga tebu bisa terbayar saat bibit telah tertanam dilahan, kemudian dipetakan selanjutnya diajukan usulan pembayaran ke perusahaan di Jakarta untuk dicairkan dananya. Sedangkan dilain pihak petani sangat membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidup mereka. Namun tahun 2018 sistem pembayaran sudah diperbaiki dengan menggunakan kartu tani berbasis lokasi titik koordinat lahan/GPS dimana tebu ditanam. Sehingga sekarang pemabayaran dilakukan paling lambat sudah bisa dibayarkan ke petani oleh PT SMS.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* terkait dalam Pengembangan Tebu Rakyat pada wilayah kerja PT SMS telah menjalankan peran dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peran *stakeholder* dalam kegiatan (1) Pemberian kredit modal kepada petani tebu; (2) Kegiatan penyuluhan; (3) Kegiatan Forum Temu Kemitraan; (4) Kegiatan kebun inti; dan (5) sistem pembayaran. Masalah koordinasi dan pembayaran sudah bisa diselesaikan, hanya saja penyuluh dibidang perkebunan perlu ditingkatkan kinerjanya dengan melakukan pendampingan ke petani tebu secara masif dan intensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuno, E. dkk, 2007. Kaji Tindak (Action Research) Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Daerah Tertinggal. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Domai, Tjajanulin. (2011) Sound Governance. Malang, UB Press.
- Hadi, Nur. (2011) Corporate Social Responsibility (edisi pertama). Yogyakarta, Graha.
- Hetifah, S.J Sumarto. (2003) Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance: 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- I P C. Putra A., Sudarto, S. Y. G. Bulu, 2017. Kajian Integrasi Tebu Dan Ternak Sapi Mendukung Kawasan Perkebunan Tebu Di Kabupaten Dompu. Prosiding Semnas Agribisnis IV 2017. Potensi dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Agribisnis Lokal Untuk Kesejahteraan Petani. Semarang 6 September 2017. Penerbit Universitas Diponogoro Semarang. ISSN: 2599-1140.
- Payne, Malcom. 1997. Modern Social Work Theory. Second Edition. MacMillan
- Pratikno. (2004) Dari Good Governance Menuju Just & Democratic Governance. Makalah untuk Seminar Nasional, FISIPOL UGM.
- Puslitbangbun, 2014. Percepatan Penerapan Teknologi Tebu

- Terpadu (P2T3). Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan. Badan Litbang Pertanian.
- P3GI, 2008. Konsep peningkatan rendemen untuk mendukung program akselerasi industri gula nasional. Konsep peningkatan-rendemen.files/dtag.htm;refreshcount. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) isri@telkom.net. (Diakses 12 Januari 2015).
- Robbins, S.P. (2001) *Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications*. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
- Soekanto, Soerjono. (1990) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Rafika Aditama. Bandung.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia. Press Ltd., London.
- Thoah, Miftah. (2003) *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Utomo, Warsito. (2006) *Administrasi Publik Baru Indonesia: Perubahan Paradigma dan Administrasi Negara ke Administrasi Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.